

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS PERHUBUNGAN

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwata'ala atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya yang senantiasa menyertai dalam menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja pada Tahun 2019, guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dikaitkan dengan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2019, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah serta masyarakat pada umumnya.

Praya, 31 Desember 2019

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah,



SUPARDAN, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196911221992031003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar	vi
Ringkasan Eksekutif	1
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan.....	3
1.2 Data Kepegawaian	4
1.3 Struktur Organisasi	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	7
2.1 Rencana Strategis.....	7
2.2 Perjanjian Kinerja.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja	12
3.2 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran	13
3.3 Analisis Efisiensi Sumber Daya	32
3.4 Akuntabilitas Keuangan	34
BAB IV PENUTUP.....	37
3.1 Kesimpulan.....	37
3.2 Saran.....	37
3.3 Penutup	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pegawai	4
Tabel 2.1	Keterkaitan (Interelasi) Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2016-2021	8
Tabel 2.2	Program dan Kegiatan Prioritas	9
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2019	10
Tabel 3.1	Skala Ordinal	13
Tabel 3.2	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019	14
Tabel 3.3	Capaian Indikator Angka Kecelakaan Lalu Lintas yang Menurun	16
Tabel 3.4	Capaian Indikator Jumlah Rambu pada Jalan Kabupaten	18
Tabel 3.5	Capaian Indikator Jumlah Pengendalian Arus Lalu Lintas	21
Tabel 3.6	Capaian Indikator Jumlah Pelaksanaan Penataan Lalu Lintas Berbasis Kawasan	23
Tabel 3.7	Capaian Indikator Jumlah Kendaraan yang Lulus Uji.....	24
Tabel 3.8	Capaian Indikator Pengendalian dan Penertiban Ijin Angkutan	28
Tabel 3.9	Capaian Indikator Rekomendasi Perijinan di Bidang Perhubungan ..	29
Tabel 3.10	Capaian Indikator Sarana dan Prasarana Transportasi	30
Tabel 3.11	Capaian Indikator Penertiban Parkir dan Terminal	30
Tabel 3.12	Capaian Indikator Sosialisasi Pelayanan Angkutan	31
Tabel 3.13	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja	32
Tabel 3.14	Aset Dinas Perhubungan Tahun 2019.....	33
Tabel 3.15	Aset Tidak Digunakan Tahun 2019.....	33
Tabel 3.16	Efisiensi Anggaran melalui Pengurangan Pagu Anggaran.....	34

Tabel 3.17 Anggaran dan Realisasi Tahun 2019..... 34

Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja..... 35

Tabel 3.19 Target dan Realisasai PAD 36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Sruktur Organisasi	6
Gambar 3.1	Rambu Lalu Lintas	19
Gambar 3.2	Patok Tikungan	20
Gambar 3.3	Road Barrier	20
Gambar 3.4	Pelaksanaan OPGAB.....	22
Gambar 3.5	Sekretariat FLLAJ.....	23
Gambar 3.6	Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	25
Gambar 3.7	Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas.....	26
Gambar 3.8	Giat Pengendalian dan Penertiban Ijin Angkutan bersama Kepolisian	28
Gambar 3.9	Giat Sosialisasi Pelayanan Angkutan	32

DAFTAR LAMPIRAN

1. CASCADING KINERJA
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
3. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
4. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah (untuk selanjutnya disebut Dinas Perhubungan) Tahun 2019 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2016 - 2021. LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2019 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai visi dan misi, Dinas Perhubungan menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian *output* kegiatan. Rincian capaian kinerja tahun 2019 untuk masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam Tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	1. Angka kecelakaan lalu lintas yang menurun	kasus	150	201	66,00
	- Jumlah rambu pada jalan kabupaten	buah	176	160	90,91
	- Pengendalian arus lalu lintas	bulan	12	12	100,00
	- Penataan lalu lintas berbasis kawasan	bulan	12	12	100,00
	- Jumlah kendaraan yang lulus uji	unit	7.500	8.020	106,93
	- Sosialisasi keselamatan berlalu lintas	kali	16	16	100,00
	2. Rasio jumlah kendaraan terhadap jumlah penumpang	rasio	-	-	-
	- Pengendalian dan penertiban ijin angkutan	kali	96	96	100,00
	- Rekomendasi perijinan di bidang Perhubungan	dokumen	2	2	100,00
	- Peningkatan sarana dan prasarana transportasi:				
	- Bus Perintis	unit	5	5	100,00
	- Speedboat	unit	2	2	100,00
	- Dermaga Tambatan Perahu	buah	2	2	100,00
	- Giat penertiban parkir dan terminal	kali	96	96	100,00
	- Sosialisasi pelayanan angkutan	kali	8	8	100,00
Rata-rata Capaian Kinerja					95,85
Kriteria					BAIK

Dari ilustrasi Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran strategis Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama berupa Angka Kecelakaan Lalu Lintas yang Menurun dan Rasio Jumlah Kendaraan terhadap Jumlah Penumpang dapat terealisasi pada tahun 2019 dengan capaian kinerja sebesar 95,85%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan berhasil dilaksanakan dengan **baik**.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan

1.1.1 Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana kewenangan otonomi daerah yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan teknis dan pemberian pelayanan umum di sektor Perhubungan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, Tugas Pokok Dinas Perhubungan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
2. Perencanaan program dan kegiatan di bidang perhubungan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;

4. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas di bidang perhubungan;
5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang perhubungan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.2 Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai pada Dinas Perhubungan kondisi per 31 Desember 2019 adalah sebanyak 44 orang sebagaimana yang dijabarkan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Data Pegawai Dinas Perhubungan
Kondisi 31 Desember 2019

No	Jenis/Kualifikasi	Jumlah (org)
1	Eselon:	
	a. II.b	1
	b. III.a	-
	c. III.b	1
	d. IV.a	7
	e. IV.b	1
2	Jabatan Fungsional:	-
3	Pangkat/Golongan:	
	a. IV	4
	b. III	24
	c. II	15
	d. I	1
4	Jenjang Pendidikan:	
	a. S3	-
	b. S2	3
	c. S1/DIV	17
	d. DIII	3
	e. SMA sederajat	20
	f. Paket C	1
Total		44

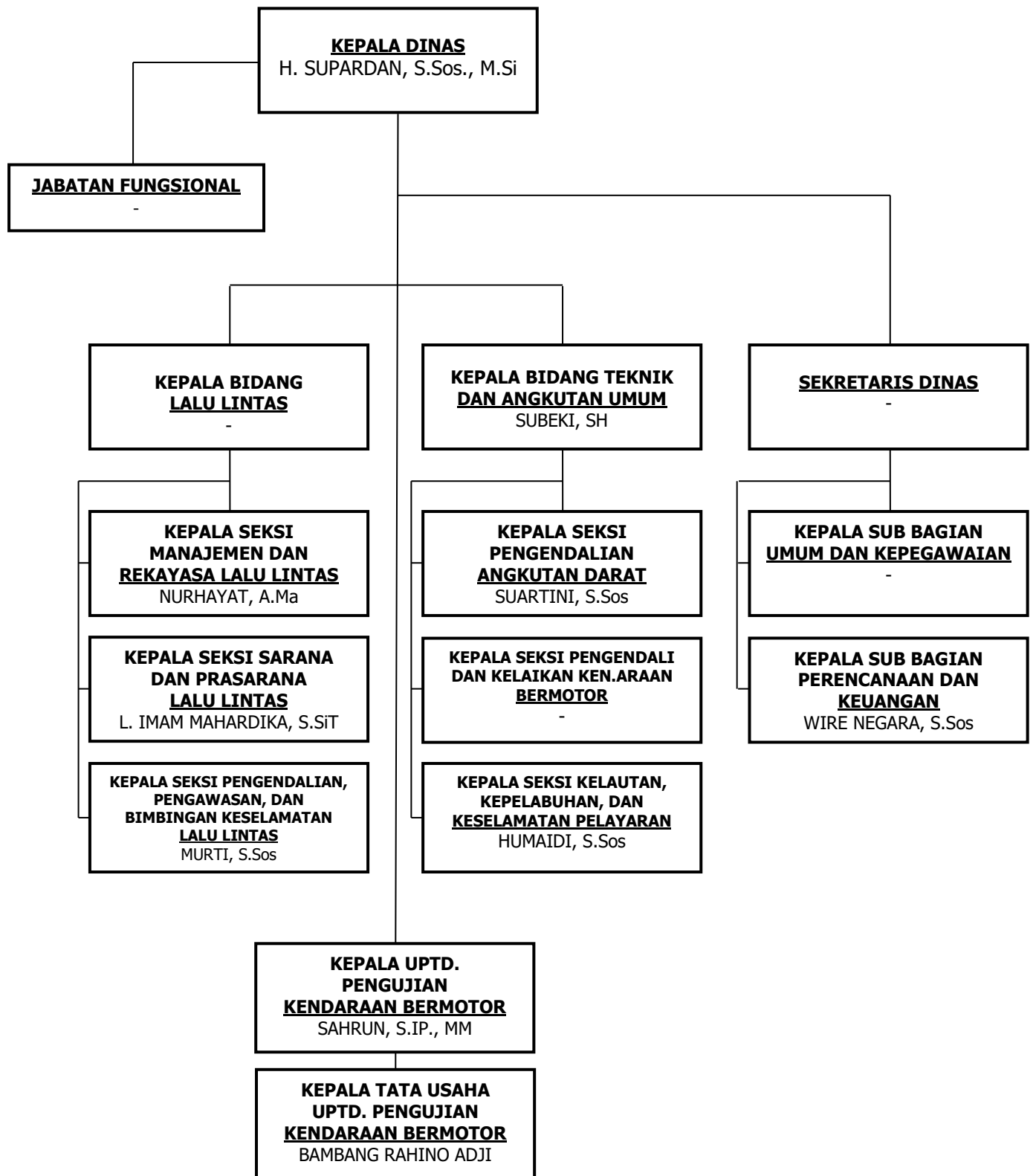
Sumber: Subbag. Umum dan Kepegawaian

Jumlah pegawai Dinas Perhubungan pada kondisi 31 Desember 2019 adalah sebanyak 44 orang. Jumlah ini masih belum memenuhi jumlah kebutuhan yaitu sebanyak 126 orang. Pada tahun 2019, terdapat 4 jabatan struktural yang kosong karena pejabat sebelumnya telah memasuki masa purna tugas, yaitu Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Lalu Lintas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta Kepala Seksi Pengendali dan Kelaikan Kendaraan Bermotor. Kekosongan jabatan ini berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam upaya pencapaian target kinerja.

Kemudian permasalahan lainnya adalah sangat minimnya jumlah tenaga teknis di bidang perhubungan. Permasalahan ini berusaha diatasi melalui pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat-diklat teknis untuk peningkatan kompetensi di bidang perhubungan. Namun begitu, jumlah pegawai yang mengikuti diklat masih jauh dari kebutuhan memadai.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 70 tahun 2016 beserta nama pejabat struktural kondisi tanggal 31 Desember 2019 adalah seperti pada Gambar 1.1 berikut ini:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Dari Gambar di atas dapat dilihat bahwa pada kondisi per tanggal 31 Desember 2019 terdapat 4 (empat) jabatan struktural yang kosong karena pejabat sebelumnya telah memasuki masa purna tugas seperti yang telah disebutkan di atas.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 adalah **“Terwujudnya masyarakat Lombok Tengah yang beriman, sejahtera dan bermutu”**. Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerukunan, kedamaian, dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan beragama melalui revolusi mental dengan mengedepankan nilai-nilai agama dan kearifan lokal;
2. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kecerdasan, dan kesehatan masyarakat dengan mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender;
3. Mendorong kemajuan ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat melalui penguatan struktur ekonomi masyarakat dengan dukungan stabilitas Kamtibmas;
4. Menjaga keselarasan, keserasian, dan keterpaduan pembangunan kawasan dan antar kawasan dengan dukungan infrastruktur yang memadai; dan
5. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan kepastian hukum dengan dukungan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Dinas Perhubungan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2016-2021, terkait erat dengan pencapaian misi ke-4 yaitu “menjaga keselarasan, keserasian, dan keterpaduan pembangunan kawasan dan antar kawasan dengan dukungan infrastruktur yang memadai”.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah. Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021 menjadi dasar pembuatan

Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah.

2.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 – 5 tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang perhubungan di Kabupaten Lombok Tengah.

Berdasarkan visi dan misi serta memperhatikan hasil analisa baik dari lingkungan internal maupun eksternal maka dirumuskan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021 yaitu **“meningkatnya infrastruktur dalam mendukung koneksitas wilayah”**.

2.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perhubungan dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Berdasarkan visi, misi, dan tujuan maka disusun sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan adalah **“menurunnya angka kecelakaan lalu lintas”**.

Tabel 2.1 Keterkaitan (Interelasi) Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya infrastruktur dalam mendukung koneksitas wilayah	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	1. Angka kecelakaan lalu lintas yang menurun
		- Jumlah rambu pada jalan kabupaten
		- Jumlah pengamanan arus lalu lintas
		2. Rasio jumlah kendaraan terhadap jumlah penumpang yang ideal
		- Frekuensi penertiban parkir dan terminal yang meningkat
		- Jumlah sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan

2.1.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai cara pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut maka dapat disusun strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan sebagai berikut:

- Sasaran : Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas
- Strategi : Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Kebijakan : 1. Penyediaan fasilitas keselamatan jalan
2. Peningkatan layanan angkutan

2.1.4 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai target kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2019, Dinas Perhubungan melaksanakan program dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

Tabel 2.2 Program dan Kegiatan Prioritas

No	Program/Kegiatan	Ket. Sumber Dana
1	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1.1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1.2. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan 1.3. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	APBD II APBD II APBD II & DAK
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan 2.1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan 2.2 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya 2.3 Kegiatan Penataan Lalu Lintas Kawasan 2.4 Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	APBD II APBD II APBD II APBD II

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 merupakan tahun ketiga Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, sehingga merupakan pertengahan proses pencapaian target kinerja lima tahunan yang telah ditetapkan pada Renstra tersebut. Perjanjian Kinerja tahun 2019 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019
Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas	1. Angka kecelakaan lalu lintas yang menurun	150 kasus
	a. Tersedianya fasilitas keselamatan jalan a. Rambu Lalu Lintas b. Patok Tikungan c. Guard Rail d. Road Barrier	70 buah 50 buah 16 meter 40 buah
	b. Giat pengendalian arus lalu lintas	12 bulan
	c. Giat penataan lalu lintas berbasis kawasan	12 bulan
	d. Peningkatan jumlah kendaraan yang lulus uji (memenuhi syarat teknis laik jalan)	7500 unit
	e. Sosialisasi keselamatan berlalu lintas	16 kali
	2. Tercapainya Rasio Ideal antara jumlah kendaraan terhadap jumlah penumpang	-
	a. Giat pengendalian dan penertiban ijin angkutan	96 kali
	b. Rekomendasi perijinan di bidang angkutan (perubahan plat nomor dan ijin trayek/non trayek)	2 dokumen

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019
	c. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi: - Bus Perintis - Speedboat - Dermaga Tambatan Perahu	5 unit 2 unit 2 buah
	d. Giat pembinaan, pengawasan, dan penertiban parkir dan terminal	96 kali
	e. Sosialisasi pelayanan angkutan	8 kali

Untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas didukung dengan anggaran sebesar Rp 8.021.702.000,00 (delapan milyar dua puluh satu juta tujuh ratus dua ribu rupiah) yang bersumber dari APBD II dan DAK.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Ordinal

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Nilai > 100	Sangat Baik
2	Nilai 86 s/d100	Baik
3	Nilai 71 s/d<85	Sedang
4	Nilai 56 s/d<70	Kurang
5	Nilai <55	Sangat Kurang

3.2 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

Dinas Perhubungan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2019. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan-keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran OPD. Tolok ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja Kepala OPD. Adapun capaian kinerja sasaran tahun 2019 adalah sebagai berikut:

➤ **Sasaran: Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas**

Sasaran tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu:

1. Angka kecelakaan lalu lintas yang menurun, yang dicapai dengan:
 - a. Ketersediaan fasilitas keselamatan jalan
 - b. Pengendalian arus lalu lintas
 - c. Penataan lalu lintas berbasis kawasan
 - d. Peningkatan jumlah kendaraan yang lulus uji
 - e. Sosialisasi keselamatan berlalu lintas
2. Rasio jumlah kendaraan terhadap penumpang yang ideal, yang dicapai dengan:
 - a. Pengendalian dan penertiban ijin angkutan

- b. Rekomendasi perijinan di bidang perhubungan (perubahan plat nomor dan ijin trayek/non trayek)
- c. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi
- d. Pembinaan, pengawasan, dan penertiban penertiban parkir dan terminal
- e. Sosialisasi pelayanan angkutan

Capaian masing-masing indikator dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya		Realisasi Sampai Tahun 2019	Target Akhir Renstra	Sumber Data
						2017	2018			
1	Angka kecelakaan lalu lintas yang menurun	kasus	150	201	66	166	210	201	110	Data Polres Lombok Tengah
1.a	Jumlah rambu pada jalan kabupaten:									Laporan Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
	- Rambu Jalan	buah	70	70	90,91	105	100	275	475	
	- Patok Tikungan	buah	50	50		40	100	190	390	
	- Pagar Pengaman Jalan (Guardrail)	meter	16	0		0	60	60	186	
	- Rambu Lainnya (Traffic Cone, Road Barrier, Rambu Pengalih Arus, dll)	buah	40	40		42	140	222	397	
1.b	Giat pengendalian arus lalu lintas	bulan	12	12	100	12	12	36	60	Laporan Seksi Pengendalian, Pengawasan, dan Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas
1.c	Giat penataan lalu lintas berbasis kawasan	bulan	12	12	100	12	12	36	60	Laporan Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
1.d	Peningkatan jumlah kendaraan yang lulus uji	unit	7.500	8.020	107	7.115	7.810	22.945	37.515	Data dari UPTD PKB
1.e	Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas	kali	16	16	100	-	-	16	17	Data dari Bidang Lalu Lintas

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya		Realisasi Sampai Tahun 2019	Target Akhir Renstra	Sumber Data
						2017	2018			
2	Rasio Jumlah Kendaraan Terhadap Jumlah Penumpang	Rasio	0	0	0	0	0	0	1/40	Belum ada data, karena survey akan direncanakan pada tahun 2020
2.a	Giat pengendalian dan penertiban ijin angkutan	kali	96	96	100	60	60	216	408	Laporan dari Seksi Pengendalian Angkutan Darat
2.b	Data jumlah rekomendasi perijinan di Bidang Perhubungan	dok	2	2	100	2	2	6	10	Laporan dari Seksi Pengendalian Angkutan Darat
2.c	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi:									Laporan dari Seksi Kelautan, Kepelabuhan, dan Keselamatan Pelayaran dan Seksi Pengendalian Angkutan Darat
	- Bus Perintis	unit	5	5	100	-	-	5	12	
	- Speedboat	unit	2	2	100	-	2	4	8	
	- Dermaga	buah	2	2	100	2	-	4	7	
2.d	Giat Pembinaan, Pengawasan, dan Penertiban Parkir dan Terminal yang Meningkat	kali	96	96	100	96	96	96	144	Laporan Seksi Pengendali dan Kelaikan Kendaraan Bermotor
2.e	Sosialisasi pelayanan angkutan	kali	8	8	100	7	5	20	17	Data dari Bidang Teknik dan Angkutan Umum
Rata-rata					95,85	Kriteria Tahun 2019: <u>BAIK</u>				

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa Sasaran Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas dengan beberapa indikator kinerja pada Dinas Perhubungan menghasilkan capaian kinerja sebesar 95,85% dengan kriteria “**baik**”.

Adapun penjelasan masing-masing indikator dari sasaran di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Indikator Angka Kecelakaan Lalu Lintas yang Menurun

Capaian indikator Angka Kecelakaan Lalu Lintas yang Menurun untuk tahun 2019 adalah sebesar 201 kasus dari target yang ditetapkan sebesar 150 kasus atau mencapai 66%. Pencapaian target pada indikator ini jika dibandingkan terhadap target Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021 dapat diuraikan pada Tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3 Capaian Indikator Angka Kecelakaan Lalu Lintas yang Menurun

No	Indikator	Satuan	Persentase Capaian Kinerja
1	Angka Kecelakaan Lalu Lintas yang menurun	kasus	
a	Tahun 2017		
	Target	166	100,00
	Realisasi	166	
b	Tahun 2018		
	Target	158	67,09
	Realisasi	210	
c	Tahun 2019		
	Target	150	66,00
	Realisasi	201	
Rata-rata Capaian Kinerja			77,70
Kriteria			SEDANG

Dari Tabel di atas terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja pada indikator angka kecelakaan lalu lintas yang menurun termasuk pada kriteria “sedang”. Dari Tabel tersebut terlihat juga bahwa angka kecelakaan lalu lintas pada tahun 2019 yang tercatat pada Polres Lombok Tengah sebanyak 201 kasus mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 210 kasus pada tahun 2018. Walaupun angka kecelakaan pada tahun 2019 ini menurun dari tahun sebelumnya (terjadi peningkatan pencapaian target), namun peningkatan tersebut masih relatif cukup jauh dari target akhir Renstra yang direncanakan yaitu sebesar 110 kasus.

Namun jika dibandingkan dengan target provinsi dan target nasional maka keadaan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah ini lebih menggembirakan, karena angka kecelakaan lalu lintas pada tingkat provinsi dan nasional justru mengalami peningkatan. Untuk wilayah provinsi, angka kecelakaan lalu lintas pada tahun 2019

meningkat sebanyak 74 kasus dibandingkan angka kecelakaan lalu lintas pada tahun 2018, yaitu sebanyak 1.668 kasus pada tahun 2018 dan 1.726 kasus pada tahun 2019.

Sedangkan pada skala nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia mencatat jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun 2019 meningkat sebanyak 3 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 107.500 kasus pada tahun 2019 dan hanya 103.672 kasus pada tahun 2018. Sementara itu dari segi usia, kecelakaan lalu lintas pada seluruh wilayah Republik Indonesia didominasi oleh generasi milenial dengan rentang usia dari 16 sampai dengan 35 tahun.

Belum tercapainya target untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas pada angka 150 kasus di wilayah Kabupaten Lombok Tengah seperti yang telah ditetapkan pada Renstra terjadi karena beberapa hal antara lain:

- 1) Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Adapun penyebab utama dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) faktor yaitu:
 - a. Faktor Manusia; faktor manusia atau *human error* ini merupakan faktor utama penyebab kecelakaan, umumnya terjadi karena kesalahan, perilaku, ataupun kemampuan pengemudi;
 - b. Faktor Kendaraan itu Sendiri; hal ini berhubungan dengan kondisi laik jalan dari kendaraan yang digunakan, seperti sistem pengereman, kondisi ban, sistem lain yang tidak berfungsi, ataupun karena modifikasi yang tidak sesuai dengan aturan keselamatan;
 - c. Faktor Jalan; seperti desain geometrik jalan dan layout yang tidak sesuai, kondisi permukaan jalan yang kurang memenuhi syarat (berlubang), fasilitas pejalan kaki yang tidak memadai, serta pencahayaan jalan;
 - d. Faktor Lingkungan; seperti faktor cuaca dan kondisi alam.
- 2) Peningkatan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan peningkatan ruas jalan.

Dari faktor-faktor di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan dalam upaya menurunkan angka kecelakaan lalu lintas seperti dalam hal penyediaan

fasilitas-fasilitas keselamatan jalan, penyediaan fasilitas pengujian kendaraan bermotor, maupun pada upaya pengendalian dan pengamanan arus lalu lintas hanya mendukung sebagian saja dari upaya penurunan angka kecelakaan tersebut. Karena pada sisi lain, semua upaya tersebut tetap tidak akan memiliki hasil tanpa diiringi oleh kesadaran pengguna jalan dalam mematuhi peraturan dalam berlalu lintas.

Berikut ini akan diuraikan beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam upaya menurunkan angka kecelakaan lalu lintas tahun 2019:

a. Penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan

Penyediaan fasilitas keselamatan jalan berupa pemasangan rambu pada jalan kabupaten dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mencapai sasaran menurunnya angka kecelakaan lalu lintas. Capaian indikator jumlah rambu pada jalan kabupaten pada tahun 2019 mencapai realisasi 90,91%, yaitu sebanyak 160 buah rambu dari 176 buah yang ditargetkan. Sedangkan capaian indikator tersebut jika dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2016-2021 dapat diuraikan pada Tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4 Capaian Indikator Jumlah Rambu pada Jalan Kabupaten

No	Indikator	Satuan	Realisasi				Target Akhir Renstra	Persentase Capaian sd. Tahun 2019	Ket.
			2017	2018	2019	Jumlah			
1a	Jumlah Rambu pada Jalan Kabupaten:								
a	Rambu Jalan	bh	105	100	70	275	475	57,89	
b	Pagar Pengaman Jalan	m	-	60	-	60	186	32,26	
c	RPPJ	bh	12	10	-	22	27	81,48	
d	Cermin Tikungan	bh	-	4	-	4	9	44,44	
e	Traffic Light	unit	2	-	-	2	4	50,00	
f	Patok Tikungan	bh	40	100	50	190	390	48,72	
g	(Traffic Cone, Rambu Pengalih Arus, Road Barrier, dll)	bh	42	140	40	222	397	55,92	
Rata-rata Capaian sampai dengan Tahun 2019								52,96	
Target Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2019								60,00	
Persentase Capaian terhadap Target								88,27	
Kriteria Capaian terhadap Target								BAIK	

Dari Tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja pada indikator Jumlah Rambu pada Jalan Kabupaten termasuk dalam kriteria **"baik"**. Beberapa upaya telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk mewujudkan komitmen dalam mencapai

target yang telah ditetapkan pada Renstra Tahun 2016-2021, antara lain melalui usulan pengadaan rambu lalu lintas melalui Dana Alokasi Khusus maupun APBN murni. Sebagai hasilnya, pada akhir tahun 2019 telah disetujui bahwa dana untuk pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas pada tahun 2020 bersumber dari DAK Afirmasi Kementerian Perdesaan dan Daerah Tertinggal RI. Usulan-usulan lainnya juga telah dan sedang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, antara lain melalui DAK Kementerian Perhubungan dan DAK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Terlebih dengan pengembangan wilayah KEK Mandalika yang tentu saja membutuhkan pemenuhan fasilitas keselamatan jalan dalam menyongsong gelaran akbar MotoGP pada tahun 2021. Berbagai upaya yang dilakukan tersebut selain untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama berupa jumlah rambu yang terpasang pada jalan kabupaten, juga untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu menurunnya angka kecelakaan lalu lintas.



Gambar 3.1 Rambu Lalu Lintas



Gambar 3.2 Patok Tikungan



Gambar 3.3 Road Barrier

b. Pengendalian Arus Lalu Lintas

Pengendalian arus lalu lintas yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan meliputi kegiatan OPGAB (operasi gabungan), pengamanan-pengamanan saat insidentil seperti pengamanan Bau Nyale, pengamanan Idul Fitri, pengaman Idul

Adha, pengamanan Safari Ramadhan, pengamanan dan pengawalan haji, pengamanan pejabat/tamu daerah, pengamanan car free day, pengamanan tahun baru, dan hari-hari besar lainnya. Tujuan pengamanan arus lalu lintas ini adalah agar terwujud dan terpeliharanya lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar, sehingga akan mampu meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunnya angka kecelakaan lalu lintas.

Adapun capaian kinerja pada indikator pengendalian arus lalu lintas terhadap target Renstra dapat diuraikan pada Tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5 Capaian Indikator Jumlah Pengendalian Arus Lalu Lintas

No	Indikator	Satuan	Realisasi				Target Akhir Renstra	Persentase Capaian sd. Tahun 2019	Ket.
			2017	2018	2019	Jumlah			
1b	Jumlah Pengendalian Arus Lalu Lintas:	bulan	12	12	12	36	60	60,00	
Target Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2019								60,00	
Persentase Capaian terhadap Target								100,00	
Kriteria Capaian terhadap Target								BAIK	

Dari Tabel tersebut terlihat bahwa capaian kinerja pada indikator jumlah pengendalian arus lalu lintas sampai dengan tahun 2019 berhasil mencapai kriteria “baik”. Capaian kinerja ini akan terus ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya agar mampu berperan secara signifikan dalam menurunkan angka kecelakaan lalu lintas.

Dalam melakukan kegiatan pengendalian lalu lintas tersebut Dinas Perhubungan juga membangun koordinasi dengan beberapa instansi terkait seperti:

- 1) Porles Lombok Tengah; koordinasi dilakukan dalam pelaksanaan tugas operasional pada saat Operasi Gabungan (OPGAB) yang terkait dengan kelengkapan izin pengendara dan kendaraan itu sendiri;
- 2) Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KPPDRD); koordinasi dilakukan dalam pelaksanaan tugas operasional pada saat Operasi Gabungan (OPGAB) yang terkait dengan dengan pajak kendaraan;
- 3) Kejaksaan Negeri dan Pengadilan dalam hal-hal hasil tugas operasional

dilapangan dalam bentuk tindak lanjut (proses hukum) hasil penjarangan Operasi Gabungan (OPGAB) berupa tilang dan barang bukti yang sudah dilimpahkan.



Gambar 3.4 Pelaksanaan OPGAB

c. Penataan Lalu Lintas Berbasis Kawasan

Kegiatan penataan lalu lintas berbasis kawasan ini dimaksudkan untuk menciptakan kondisi lalu lintas pada suatu kawasan agar dapat berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Beberapa hal yang telah dilakukan antara lain melalui kegiatan rawan pagi, rawan pasar, maupun pembentukan Forum Lalu dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Kabupaten Lombok Tengah.

FLLAJ ini sebagaimana disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang berfungsi untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Fungsi menyinergikan ini dimaksudkan untuk menganalisis permasalahan serta menjembatani, menemukan

solusi, dan meningkatkan kualitas pelayanan.



Gambar 3.5 Sekretariat FLLAJ pada Dishub Kab. Lombok Tengah

Kegiatan FLLAJ untuk tahun 2019 dibentuk berdasarkan SK Bupati Lombok Tengah Nomor 250 Tahun 2019 yang beranggotakan unsur Sekretariat Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Bappeda, Satpol-PP, Polres Lombok Tengah, Wartawan, LSM, KNPI, dan tokoh masyarakat. Melalui FLLAJ, masyarakat juga dapat menyampaikan keluhan terhadap permasalahan di jalan raya melalui berbagai alternatif, mulai dari SMS Center, saluran telepon, sosial media, hingga pada aplikasi khusus berbasis android yaitu Pelor Mas (Pelaporan Online Transportasi Berbasis Masyarakat).

Adapun capaian kinerja pada indikator penataan lalu lintas berbasis kawasan ini dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.6 Capaian Indikator Jumlah Pelaksanaan Penataan Lalu Lintas Berbasis Kawasan

No	Indikator	Satuan	Realisasi				Target Akhir Renstra	Persentase Capaian sd. Tahun 2019	Ket.
			2017	2018	2019	Jumlah			
1c	Giat Penataan Lalu Lintas Berbasis Kawasan	bulan	12	12	12	36	60	60,00	
Target Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2019								60,00	
Persentase Capaian terhadap Target								100,00	
Kriteria Capaian terhadap Target								BAIK	

d. Peningkatan Jumlah Kendaraan yang Lulus Uji

Sasaran untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas juga dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah melalui upaya peningkatan kualitas pengujian kendaraan bermotor. Pengujian kendaraan bermotor merupakan serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian-bagian kendaraan wajib uji dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimanatkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan, serta memberikan pelayanan umum kepada masyarakat agar terwujud lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, dan nyaman.

Capaian kinerja pengujian kendaraan bermotor pada diukur dengan indikator jumlah kendaraan yang diuji setiap tahunnya. Adapun hasil dari capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut ini:

Tabel 3.7 Capaian Indikator Jumlah Kendaraan yang Lulus Uji

No	Indikator	Satuan	Realisasi				Target Akhir Renstra	Persentase Capaian sd. Tahun 2019	Ket.
			2017	2018	2019	Jumlah			
1d	Jumlah Kendaraan yang Lulus Uji	unit	7.115	7.810	8.020	22.945	37.515	61,16	
Target Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2019								60,00	
Persentase Capaian terhadap Target								101,94	
Kriteria Capaian terhadap Target								SANGAT BAIK	

Dari Tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja pada indikator jumlah kendaraan yang lulus uji mencapai hasil 101,94% atau tergolong “**sangat baik**”. Capaian ini harus dapat dipertahankan dan bahkan harus terus ditingkatkan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta dalam upaya mencapai sasaran untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas.

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten

Lombok Tengah pada tahun 2019 dalam upaya peningkatan kualitas pengujian kendaraan bermotor adalah melalui peningkatan sarana dan prasarana PKB seperti pengadaan alat uji emisi gas buang, pengkalibrasian 4 (empat) unit alat uji, pemeliharaan alat uji, pengadaan meubelair, serta penataan halaman gedung PKB.



Gambar 3.6 Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor

e. Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas

Upaya penurunan angka kecelakaan lalu lintas lainnya yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan adalah melalui gerakan sosialisasi keselamatan berlalu lintas yang dilaksanakan pada 12 SMA/SMK di 12 kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan sosialisasi tersebut sengaja menyasar kaum pelajar karena menurut data dari Polres Lombok Tengah generasi milenial masih mendominasi dalam kategori korban kecelakaan lalu lintas.

Adapun jenis sosialisasi keselamatan berlalu lintas yang telah dilaksanakan

oleh Dinas Perhubungan pada Tahun 2019 adalah:

1. Sosialisasi Pelaksanaan Fasilitas Keselamatan Jalan sebanyak 3 kali;
2. Sosialisasi Perlengkapan Jalan, Perengkapan Kendaraan, dan Tata Cara Berlalu Lintas sebanyak 12 kali; dan
3. Seleksi Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ sebanyak 1 kali.

Kemudian pada tanggal 3 Maret 2019, Dinas Perhubungan juga turut serta dalam menyukseskan program kampanye keselamatan berlalu lintas yang mengambil tajuk “Millenial Road Safety Festival” yang merupakan program nasional yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.



Gambar 3.7 Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas

Seluruh upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan seperti yang telah

diuraikan di atas yaitu mulai dari penyediaan fasilitas keselamatan jalan, pengendalian arus lalu lintas, penataan lalu lintas berbasis kawasan, pengujian kendaraan bermotor, serta sosialisasi keselamatan berlalu lintas bermuara pada satu tujuan, yaitu untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas.

2. Indikator Rasio Jumlah Kendaraan terhadap Jumlah Penumpang

Capaian indikator rasio jumlah kendaraan terhadap jumlah penumpang yang ditargetkan berhasil mencapai kondisi ideal yaitu pada rasio 1:40 belum dapat diukur pada tahun 2019, karena pada Renstra Dinas Perhubungan kegiatan survey Statis-Dinamis Angkutan Umum yang bertujuan untuk mengukur rasio ini direncanakan akan dilakukan pada tahun 2020. Data rasio tersebut perlu dikaji karena semakin banyak masyarakat yang menggunakan angkutan umum maka semakin efektif pula penggunaan jalan raya.

Namun permasalahan utama yang dihadapi dalam pelayanan angkutan umum di Kabupaten Lombok Tengah ini adalah semakin rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dikarenakan semakin tingginya penggunaan roda dua maupun kendaraan pribadi. Dari hasil survey yang dilakukan pada tahun 2017, hanya 14% masyarakat yang bersedia menggunakan angkutan umum, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 86% memilih untuk tidak menggunakan angkutan umum. Salah satu penyebabnya adalah belum tersedianya angkutan perdesaan yang efektif dan efisien yang melayani seluruh wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk mengurai permasalahan tersebut antara lain melalui pembukaan trayek perintis Kute–Selong Belanak (PP), dan Kute–Awang (PP). Kemudian juga telah dirintis trayek khusus untuk pelajar yaitu jurusan Praya–Kopang, Praya–Jonggat, Praya–Mujur, dan Praya–Jonggat.

Kegiatan-kegiatan lain yang juga telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum pada tahun 2019 antara lain:

a. Pelaksanaan Pengendalian dan Penertiban Ijin Angkutan

Pelaksanaan kegiatan yang berkoordinasi dengan pihak kepolisian ini bertujuan untuk menertibkan administrasi ijin angkutan umum, seperti ijin trayek dan kartu pengawasan, baik untuk kendaraan dalam trayek maupun tidak dalam trayek. Kegiatan ini dilakukan pada seluruh lintasan trayek se Kabupaten Lombok Tengah.

Capaian kinerja pada indikator ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Capaian Indikator Pengendalian dan Penertiban Ijin Angkutan

No	Indikator	Satuan	Realisasi				Target Akhir Renstra	Persentase Capaian sd. Tahun 2019	Ket.
			2017	2018	2019	Jumlah			
2a	Pengendalian dan Penertiban Ijin Angkutan	kali	60	60	96	216	408	52,94	
Target Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2019								52,94	
Persentase Capaian terhadap Target								100,00	
Kriteria Capaian terhadap Target								BAIK	

Dari Tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja pada indikator pengendalian dan penertiban ijin angkutan telah mencapai 100% pada tahun ketiga Renstra, artinya pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan yang direncanakan.



Gambar 3.8 Giat Pengendalian dan Penertiban Ijin Angkutan bersama Kepolisian

b. Rekomendasi Perijinan di Bidang Perhubungan

Rekomendasi perijinan yang masih dilayani oleh Dinas Perhubungan adalah rekomendasi perubahan plat nomor dan rekomendasi ijin trayek. Penerbitan

rekomendasi ini dimaksudkan untuk menertibkan angkutan umum, karena masih ditemukannya kendaraan plat hitam yang dioperasikan untuk mengangkut penumpang.

Capaian kinerja pada indikator ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian Indikator Rekomendasi Perijinan di Bidang Perhubungan

No	Indikator	Satuan	Realisasi				Target Akhir Renstra	Persentase Capaian sd. Tahun 2019	Ket.
			2017	2018	2019	Jumlah			
2b	Rekomendasi Perijinan di Bidang Perhubungan	dok	2	2	2	6	10	60,00	
Target Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2019								60,00	
Persentase Capaian terhadap Target								100,00	
Kriteria Capaian terhadap Target								BAIK	

Tabel di atas menjelaskan bahwa pelaksanaan penerbitan rekomendasi di Bidang Perhubungan telah berjalan sesuai dengan target yang direncanakan.

c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan penambahan jumlah sarana dan prasarana transportasi, baik yang meliputi transportasi darat maupun transportasi perairan. Penambahan sarana dan prasarana transportasi tersebut berupa bus perintis sebanyak 5 unit, speedboat sebanyak 2 unit, dan dermaga tambatan perahu di Desa Mertak dan Desa Kidang.

Adapun capaian kinerja pada indikator tersebut terhadap target Renstra dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.10 Capaian Indikator Sarana dan Prasarana Transportasi

No	Indikator	Satuan	Realisasi				Target Akhir Renstra	Persentase Capaian sd. Tahun 2019	Ket.
			2017	2018	2019	Jumlah			

2c	Sarana dan Prasarana Transportasi:								
	- Bus	unit	-	-	5	5	12	41,67	
	- Speedboat	unit	-	2	2	4	8	50,00	
	- Dermaga Tambatan Perahu	buah	2	-	2	4	7	57,14	
Rata-rata Capaian sd. Tahun 2019								49,60	
Target Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2019								60,00	
Persentase Capaian terhadap Target								82,67	
Kriteria Capaian terhadap Target								BAIK	

Anggaran penambahan sarana dan prasarana transportasi bersumber dari DAK Kementrian Perdesaan dan Daerah Tertinggal RI, dan sampai dengan tahun 2019 capaian kinerja terhadap target Renstra telah berjalan dengan baik.

d. Meningkatnya Penertiban Parkir dan Terminal

Capaian indikator Frekuensi Penertiban Parkir dan Terminal yang Meningkat sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.11 berikut ini:

Tabel 3.11 Capaian Indikator Penertiban Parkir dan Terminal

No	Indikator	Satuan	Persentase Capaian Kinerja
2.d	Frekuensi Penertiban Parkir dan Terminal yang Meningkat	kali	
a	<i>Tahun 2017</i>		
	Target	96	100,00
	Realisasi	96	
b	<i>Tahun 2018</i>		
	Target	96	100,00
	Realisasi	96	
c	<i>Tahun 2019</i>		
	Target	96	100,00
	Realisasi	96	
Rata-rata Capaian Kinerja			100,00
Kriteria			BAIK

Dari Tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja Dinas Perhubungan pada indikator Frekuensi Penertiban Parkir dan Terminal berhasil mencapai kriteria “baik”.

Penertiban parkir dan terminal ini dimaksudkan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dan mendukung penataan kota melalui peningkatan kedisiplinan pengguna jalan dan angkutan umum dalam mematuhi peraturan berlalu lintas.

e. Sosialisasi Pelayanan Angkutan

Selain sosialisasi dalam bidang keselamatan lalu lintas, Dinas Perhubungan juga melaksanakan sosialisasi dalam bidang pelayanan angkutan. Jenis sosialisasi yang telah dilakukan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Angkutan Kawasan Wisata sebanyak 1 kali;
2. Sosialisasi Keselamatan Pelayaran sebanyak 3 kali;
3. Sosialisasi Perijinan Angkutan Laut sebanyak 3 kali; dan
4. Sosialisasi Juru Parkir sebanyak 1 kali.

Capaian kinerja pada indikator jumlah sosialisasi ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12 Capaian Indikator Sosialisasi Pelayanan Angkutan

No	Indikator	Satuan	Realisasi				Target Akhir Renstra	Persentase Capaian sd. Tahun 2019	Ket.
			2017	2018	2019	Jumlah			
2e	Jumlah Sosialisasi Pelayanan Angkutan	kali	7	5	8	20	17	117,65	
Target Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2019								60,00	
Persentase Capaian terhadap Target								196,08	
Kriteria Capaian terhadap Target								SANGAT BAIK	

Dari Tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator Jumlah Sosialisasi Pelayanan Angkutan telah melampaui target yang telah ditetapkan pada Renstra, yaitu sebanyak 20 kali dari target sebanyak 17 kali jumlah sosialisasi sampai akhir tahun 2021. Pelampauan capaian target ini menunjukkan kinerja Dinas Perhubungan pada indikator ini termasuk dalam kriteria “**sangat baik**”.



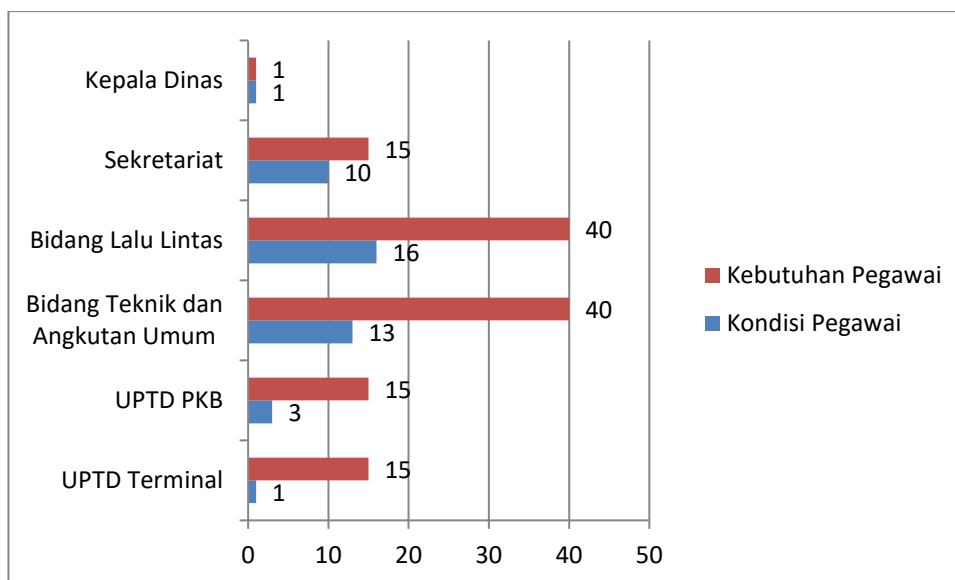
Gambar 3.9 Giat Sosialisasi Pelayanan Angkutan

3.3 Analisis Efisiensi Sumber Daya

3.3.1 Analisis Efisiensi SDM dan Aset

Pencapaian sasaran strategis Dinas Perhubungan tidak dapat dilepaskan dari aspek sumber daya yang dimiliki. Adapun efisiensi sumber daya aparatur pada tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.13 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja



Pada tahun 2019, Dinas Perhubungan mengalami kekurangan pegawai pada Sekretariat dan seluruh bidang teknis. Kondisi ini mengharuskan pegawai yang ada melaksanakan tugas dan fungsi yang lebih besar dari tanggung jawab dan beban kerja yang dimiliki.

Selain aspek sumber daya manusia, pencapaian kinerja Dinas Perhubungan dipengaruhi oleh kondisi aset yang dimiliki. Adapun aset yang dimiliki Dinas Perhubungan tahun 2019 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.14 Aset Dinas Perhubungan Tahun 2019

No	Jenis Aset	Nilai (Rp)	Jumlah Item
1	KIB A (Tanah)	2.253.000.000,00	26
2	KIB B (Peralatan dan Mesin)	9.369.248.440,00	168
3	KIB C (Gedung dan Bangunan)	9.930.323.030,00	1.653
4	KIB D (Jalan, Irigasi, dan Jaringan)	17.512.853.150,00	41
5	KIB F (Konstruksi dalam Pengerjaan)	3.881.548.730,00	2
Jumlah		42.946.973.360,00	1.890

Jumlah aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15 Aset Tidak Digunakan Tahun 2019

No	Jenis Aset	Nilai (Rp)	Jumlah Item
1	KIB A (Tanah)	0,00	-
2	KIB B (Peralatan dan Mesin)	0,00	-
3	KIB C (Gedung dan Bangunan)	0,00	-
4	KIB D (Jalan, Irigasi, dan Jaringan)	0,00	-
5	KIB F (Konstruksi dalam Pengerjaan)	0,00	-
Jumlah		0,00	-

Berdasarkan Tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa nilai aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan adalah sebesar Rp 0,00. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan telah melakukan efisiensi sumber daya manusia dengan memanfaatkan aset secara optimal dalam mendukung capaian kinerja.

3.3.2 Analisis Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran pada Dinas Perhubungan untuk tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Efisiensi anggaran dilakukan dengan cara mengurangi pagu anggaran dari tahun sebelumnya tanpa mengurangi output/capaian kinerja. Efisiensi dilakukan pada belanja operasional yang berfungsi sebagai pendukung capaian kinerja, sehingga tidak mengurangi output/capaian kinerja dari tahun sebelumnya. Kegiatan-kegiatan tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.16 Efisiensi Anggaran melalui Pengurangan Pagu Anggaran

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran		Selisih
		Tahun 2018	Tahun 2019	
1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	20.650.000,00	15.150.000,00	5.500.000,00
2	Penataan Lalu Lintas Kawasan	226.264.900,00	149.683.000,00	76.581.900,00

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Dinas Perhubungan dapat diketahui dari aspek anggaran dan realisasi Belanja tahun 2019 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.17 Anggaran dan Realisasi Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Tidak Langsung	3.547.688.448,50	3.323.794.198,00	93,69
2	Belanja Langsung	8.021.702.000,00	7.428.322.550,00	92,60
Jumlah		11.569.390.448,50	10.752.116.748,00	92,94

Penyerapan anggaran Belanja Dinas Perhubungan tahun 2019 sebesar 93,69% dari anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebesar 92,60%. Dari realisasi anggaran di atas menunjukkan bahwa serapan anggaran sudah sangat baik atau lebih dari 91%.

Keseimbangan tingkat kinerja dengan keuangan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja suatu Organisasi Perangkat Daerah. Berikut perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Kinerja						Keuangan			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tar-get	Realisasi	%	Program	Target	Realisasi	%
1	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	1. Angka Kecelakaan Lalu Lintas yang Menurun (kasus)	150	201	66,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan	649.599.000	615.931.704	94,82
		Jumlah rambu pada jalan kabupaten:							
		- Rambu Jalan	70	70	90,91				
		- Patok Tikungan	50	50					
		- Pagar Pengaman Jalan (Guardrail)	16	0					
		- Rambu Lainnya (Traffic Cone, Road Barrier, Rambu Pengalih Arus, dll)	40	40					
		Giat pengendalian arus lalu lintas	12	12	100				
		Giat penataan lalu lintas berbasis kawasan	12	12	100				
		Peningkatan jumlah kendaraan yang lulus uji	7.500	8.020	107				
		Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas	16	16	100				
		2. Rasio Kendaraan terhadap Penumpang	-	-	-	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	6.545.752.700	6.095.724.305	93,12
		Giat pengendalian dan penertiban ijin angkutan	96	96	100				
		Data jumlah rekomendasi perijinan di Bidang Perhubungan	2	2	100				
		Peningkatan sarana dan prasarana transportasi:							
		- Bus Perintis	5	5	100				
		- Speedboat	2	2	100				
		- Dermaga	2	2	100				
		Giat Pembinaan, Pengawasan, dan Penertiban Parkir dan Terminal yang Meningkat	96	96	100				
		Sosialisasi pelayanan angkutan	8	8	100				

Berdasarkan data dalam Tabel di atas, secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama tahun

2019 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Kemudian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan juga menangani Penerimaan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Dinas Perhubungan menangani Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Dinas Perhubungan juga menangani Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Terminal.

Adapun target dan realisasi PAD pada Dinas Perhubungan untuk Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.19 berikut ini:

Tabel 3.19 Target dan Realisasi PAD Dinas Perhubungan

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Retribusi Daerah	1.020.260.000,00	553.453.000,00	54,25
1.1	Retribusi Jasa Umum	943.460.000,00	546.953.000,00	57,97
	- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	582.360.000,00	102.942.000,00	17,68
	- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	361.100.000,00	444.011.000,00	122,96
1.2	Retribusi Jasa Usaha	76.800.000,00	6.500.000,00	8,46
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Angguna)	48.000.000,00	6.500.000,00	13,54
	- Retribusi Tempat Khusus Parkir	28.800.000,00	0,00	0,00

Sumber: Laporan Keuangan Tahun 2019

Dari Tabel di atas terlihat bahwa pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor berhasil melampaui target yaitu sebesar 122,96%. Dari segi jumlah kendaraan yang diuji juga berhasil melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebanyak 8.020 unit dari target sebanyak 7.500 unit atau sebesar 106,93%.

BAB IV

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan dan memiliki fungsi pelayanan di Bidang Perhubungan kepada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana, serta sarana dan prasarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data di atas, maka secara umum Dinas Perhubungan telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang menjadi tanggung jawab organisasi secara keseluruhan dengan rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2019 adalah sebesar 95,85% dengan kriteria **baik**. Dalam usaha mencapai sasaran tersebut, Dinas Perhubungan menetapkan 1 (satu) sasaran yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) Program dan 17 (tujuh belas) Kegiatan yang merupakan indikator kinerja dalam pencapaian target sasaran.

Melihat persentase capaian sasaran tersebut maka masih diperlukan adanya peningkatan dan penyempurnaan serta konsistensi dari segenap pelaksana kegiatan terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan.

5.2 Saran

1. Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di Bidang Perhubungan yang bisa dilakukan dengan mengadakan kerja sama perekrutan SDM dengan Instansi Sekolah Tinggi Transportasi baik darat maupun laut.
2. Program kegiatan yang kurang atau belum sesuai dengan harapan dalam Renstra atau Renja perlu ditingkatkan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna secara lebih optimal.

3. Kerja sama maupun kemitraan dengan berbagai pihak perlu ditingkatkan agar dapat turut berpartisipasi secara aktif dalam mendukung terealisasinya program organisasi.

5.3 Penutup

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan ini masih banyak terdapat hal yang kurang sempurna, maka kami siap menerima saran dan kritik yang membangun agar penyusunan LKjIP dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Praya, 31 Januari 2020
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah,

H. SURARDAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691122 199203 1 004

LAMPIRAN

